

Partisipasi BIG dalam *International Cartographic Conference* di Tokyo



Presentasi BIG di ICC

Puncak forum ilmiah *International Cartographic Association* (ICA) adalah *International Cartographic Conference* (ICC) yang sekarang telah memasuki tahun ke 29. Pelaksanaan ICC ke 29 di Odaiba Kota Tokyo ini mempunyai arti strategis karena dunia telah memasuki industri 4.0, bahkan menuju ke 5.0. Disamping itu, dunia juga telah bersepakat memegang tujuan bersama dalam menyejahterakan penduduk melalui SDGs (*sustainable development goals*). Kedua momentum ini menjadikan ajang forum kartografi di Tokyo cukup strategis.

Bagi Delegasi BIG, forum ini sebagai sarana meneguhkan sumbangsih kartografi untuk berperan lebih dalam mendukung kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan tema ICC yaitu *Mapping Everything for Everyone* atau memetakan semua hal untuk kepentingan semua orang.

Indonesia turut andil dalam ICC tersebut melalui Delegasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG). BIG merupakan penanggung jawab IG di Indonesia, dimana kartografi adalah bagian penting dalam IG. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan ilmu kartografi dalam representasi data geospasial di BIG dan Kementerian/Lembaga. Selain itu untuk memastikan bahwa produk peta dihasilkan oleh tangan-tangan kartograf, maka BIG menerapkan sertifikasi bidang kartografi. Berdasarkan hal tersebut, BIG menganggap bahwa ICC merupakan ajang penting untuk menggalai keterbaruan informasi bidang

kartografi dari berbagai pakar negara-negara lain. Selain itu juga menunjukkan kemajuan kartografi di Indonesia kepada negara lain, seperti pembuatan atlas dan kreasi anak sekolah tingkat dasar dalam menghasilkan gambar peta.

Dalam salah satu forum komisi, PPTRA mempresentasikan makalah berjudul *The Republic of Indonesia Territorial Atlas as Geoliteration Tools for the Adolescents*. Materi presentasi ini memperoleh sambutan hangat dan pujian dari para peserta karena atlas yang dihasilkan BIG-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini langsung terpakai untuk materi pembelajaran di kelas SMP. Selain presentasi, Delegasi BIG juga terlibat langsung dalam *General Assembly* yang dihadiri oleh seluruh negara yang tergabung dalam keanggotaan ICA dan *Bilateral Meeting* dengan pengurus ICA terkait status keanggotaan Indonesia. [Fakhrudin Mustofa, 2019]

Ada **41** Rekomendasi

Progres Asistensi dan Supervisi Tata Ruang

Rekomendasi Peta RDTR

Provinsi	Kabupaten	RDTR	Tanggal Rekomendasi
Bali	Buleleng	Gerokgak	2019-01-15
Jawa Timur	Pamekasan	Pamekasan	2019-03-05
Maluku Utara	Halmahera Selatan	Obi	2019-03-26
Jawa Timur	Ngawi	Ngrambe	2019-03-26
Jawa Timur	Ngawi	Kedungalar	2019-03-26
Jawa Timur	Ngawi	Widodaren	2019-03-26
Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Kota Kambang	2019-03-26
Papua	Merauke	Tanah Miring	2019-03-26
Maluku Utara	Halmahera Selatan	Labuha	2019-03-26
Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	KEK Mandalika	2019-03-26
Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	Tobadak	2019-04-30

Rekomendasi Peta KSP

Provinsi	KSP	Tanggal Rekomendasi
Banten	KP3B Banten	2019-03-26
Banten	Banten Lama	2019-03-26

Rekomendasi Peta RTRW Kota/Kab

Provinsi	RTRW Kab/Kota	Tanggal Rekomendasi
Banten	Serang	2019-01-17
Sumatera Barat	Sijunjung	2019-01-24
Jawa Timur	Kota Malang	2019-01-29
Papua	Nabire	2019-02-18
Banten	Kota Tangerang Selatan	2019-02-19
Banten	Kota Tangerang	2019-02-26
Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	2019-03-05
Jawa Tengah	Temanggung	2019-03-26
Sulawesi Tenggara	Wakatobi	2019-03-26
Jawa Tengah	Kendal	2019-03-26
Sumatera Barat	Agam	2019-03-26
Kalimantan Tengah	Kapuas	2019-03-26
Riau	Kota Dumai	2019-04-23

Provinsi	RTRW Kab/Kota	Tanggal Rekomendasi
Kalimantan Tengah	Barito Utara	2019-05-10
Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	2019-05-17
Daerah Istimewa Yogyakarta	Kulonprogo	2019-07-24
Kalimantan Tengah	Katingan	2019-07-24
Kepulauan Riau	Karimun	2019-07-24
Jawa Timur	Sampang	2019-07-24
Jawa Tengah	Wonogiri	2019-07-24
Jawa Tengah	Banjarnegara	2019-07-24
Jawa Timur	Ngawi	2019-07-24
Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	2019-07-24
Jambi	Sungai Penuh	2019-07-24
Sumatera Selatan	Banyuasin	2019-07-24
Kalimantan Tengah	Seruyan	2019-07-24

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi :

PUSAT PEMETAAN TATA RUANG DAN ATLAS
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Gedung F Lantai 2
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor

Telp - PPTRA : (021) 8764613
Fax - PPTRA : (021) 8764613
Email : redaksi.pttra@gmail.com
Twitter : @pptra_big
Instagram : @pptra_big
http://big.go.id/newsletter/



TATA RUANG & ATLAS NEWSLETTER

MEDIA INFORMASI PEMETAAN TATA RUANG, DINAMIKA SUMBERDAYA, DAN ATLAS



Peran Informasi Geospasial (IG) dalam penataan ruang semakin dirasakan oleh pemerintah daerah. Penataan ruang yang baik memerlukan IG, karena efektivitas perencanaan yang baik dipengaruhi oleh tingkat ketelitian atau kedalaman pengaturan dan skala peta yang ada. Salah satu program dukungan penataan ruang BIG yang menjadi program prioritas nasional adalah penyusunan peta RDTR wilayah perbatasan.

Kegiatan pemetaan tata ruang perbatasan ditujukan untuk memfasilitasi penyediaan peta dasar dan verifikasi peta tematik yang dibutuhkan dalam menyusun RDTR. Hasil kegiatan berupa serangkaian dataset IG sebagai dasar pertimbangan sekaligus masukan Kementerian ATR/BPN untuk penetapan rencana tata ruang sebelum disahkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian fungsi IG menjadi penting terkait akurasi dan presisi data agar menghasilkan

kualitas tata ruang yang lebih baik. Kegiatan prioritas nasional ini membutuhkan koordinasi dengan banyak sektor seperti Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Kementerian PUPR dan pusat lain di internal BIG. Program seperti ini diharapkan memacu percepatan penyediaan peta dasar pada kawasan yang tidak tersedia peta dasarnya.

Kementerian ATR/BPN secara mandiri melakukan penyediaan peta dasar pada wilayah yang tidak tersedia peta dasarnya, dan kegiatan tersebut dibolehkan secara hukum dengan bantuan dan supervisi dari BIG. Jadi program percepatan tata ruang yang dilakukan oleh PPTRA pada wilayah perbatasan pada dasarnya adalah atas nama dan semangat BIG untuk membantu percepatan penyelesaian tata ruang wilayah perbatasan, meliputi penyediaan IG baik berupa peta dasar, peta tematik dan substansi materi perencanaan yang sudah disesuaikan dengan muatan album peta. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa wilayah perbatasan termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang penataan ruangnya diprioritaskan. Wilayah perbatasan memiliki pengaruh sangat

Catatan Beranda

penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, ekonomi, dan sosekbud dan bahkan lingkungan hidup. Penataan ruang KSN, termasuk perbatasan menjadi wewenang pemerintah pusat, termasuk BIG.

Selain membahas program perbatasan selama bulan Juni dan Juli, kami juga disibukkan dengan penyusunan atlas sumberdaya alam gunung api. Atlas adalah output unik bagi BIG sehingga kegiatan penyusunan atlas akan terus kami dukung dan gaungkan, bahkan dalam rencana restrukturisasi organisasi yang baru, PPTRA idealnya dipisah menjadi dua pusat yaitu Pusat Tata Ruang dan Pusat Atlas. Kita sudah mengusulkan rencana struktur baru tersebut, namun semua dikembalikan kepada kebijakan pimpinan di BIG dan tentu di Kementerian PANRB. Semoga informasi pada newsletter ini bermanfaat bagi banyak pihak. Aamiin. Selamat membaca. [Mulyanto Darmawan, 2019]

Kebijakan & Isu Strategis

Badan Informasi Geospasial (BIG) merupakan instansi pemerintah yang menjalankan tugas utama terkait dengan informasi geospasial. Dalam menjalankan tugasnya, BIG tidak hanya berjalan sendiri, namun juga harus berkolaborasi dan bersinergi dengan negara-negara lain yang tergabung dalam organisasi internasional (OI), utamanya terkait informasi geospasial. Dengan mengikuti OI tersebut BIG dapat berdiskusi, bertukar pikiran dan pengalaman, unjuk prestasi sekaligus mengetahui kekurangan dan kemajuan negara lain sehingga dapat memacu kinerjanya kearah lebih baik lagi. Organisasi internasional yang diikuti BIG antara lain *United Nations Group of Expert on Geographical Names (UNGEGN)* yaitu Kelompok Ahli/expert PBB untuk Nama Geografis, *International Cartographic Association (ICA)*, *International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)* dan beberapa OI profesi lain. Dua nama yang disebut terakhir, BIG sempat dipertanyakan status keanggotaannya. BIG diminta menjelaskan didepan kelompok kerja (pokja) yang mengurus OI dibawah koordinasi Kementerian Luar Negeri terkait arti penting dan manfaatnya menjadi anggota ICA dan IUGG bagi BIG dan Indonesia pada umumnya.

ICA merupakan organisasi non profit (nirlaba) internasional yang bergerak dalam forum ilmiah terkait perkembangan, isu terkini, dan teknik kartografi dan *Geospatial Information (GI) Science*. Tujuan ICA adalah untuk memastikan bahwa kartografi dan GI Science digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan ilmu pengetahuan melalui representasi disiplin ilmu dan profesi kartografi dan *GI Science* secara internasional. BIG mempunyai tugas dan fungsi utamanya dalam penyelenggaraan informasi geospasial, dimana untuk menjalankan tugas ini tidak terlepas dari teknologi dan sains terkait kartografi dan informasi geospasial. Melalui forum pertemuan dalam ICA inilah, BIG melalui PPTRA menimba ilmu mengenai dunia pemetaan negara lain.

Salah satu tugas PPTRA adalah menyusun atlas berbagai tema baik untuk tujuan pendidikan, pembangunan nasional maupun tema lain yang akan digunakan secara langsung oleh masyarakat luas. Dengan adanya ICA, dapat menjadi ajang bertukar ilmu, pengetahuan dan pengalaman terkait teknologi kartografi khususnya dan informasi geospasial secara luas dengan berbagai negara diseluruh dunia. ICA mempunyai kurang lebih 27 komisi dan kelompok kerja, diantaranya adalah komisi

Art and Cartography, Atlases, Cartography and Children, Map and Graphic for Blind and Partially sighted people, dan komisi teknis lain, dimana komisi-komisi tersebut sangat sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh BIG hingga saat ini. Selama ini, keikutsertaan BIG dalam program ICA antara lain mengikuti *International Cartographic Conference (ICC)* yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali dan mengikuti Lomba Gambar Barbara Pitchehnik. Gambar peta anak Indonesia dikirim oleh BIG sebagai penyelenggara lomba gambar nasional yang hasilnya dikirim ICC pada Barbara Petchenik Award. Pada tahun 2011 - 2015 salah satu personil BIG ditunjuk menjadi *Vice President - ICA* dan juga menjadi wakil komisi pada *Cartographic and children*. Hal ini merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan yang tiada tara bagi BIG dan Bakosurtanal waktu itu.

Dengan mengikuti OI terkait ilmu/teknologi informasi geospasial, cukup besar manfaatnya bagi BIG sebagai ajang untuk menimba referensi ilmiah, ajang pergaulan internasional, *positioning*, sosialisasi dan kerjasama antar negara anggota. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika suatu ketika BIG keluar dari keanggotaan organisasi internasional tersebut. [Niendyawati, 2019]

REDAKSI:

| Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas | Tim Redaksi: Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas |

| Editor: Mulyanto Darmawan, Fakhrudin Mustofa, Sri Eka Wati, Randhi Atiqi, Chintia Dewi |

| Desain Tata Letak: Ika Rosalika |



BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Provinsi Bali sebagai Fokus Wilayah Survei Kegiatan Pemetaan Integrasi NSDA untuk Dukungan KLHS



Koordinasi ke Instansi

Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri No. 7 Tahun 2018 telah mengatur tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan. Hal ini khususnya terkait dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada wilayah yang telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). KLHS yang dimaksud harus mencakup analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau

kebijakan, rencana, dan/atau program. Salah satu bagian dari KLHS yaitu gambaran umum daerah yang mendeskripsikan kondisi umum daerah terkait aspek geografis dan demografis. Didalamnya termasuk data potensi dan pemanfaatan sumber daya alam serta nilai kekayaan sumberdayanya (neraca). Dengan demikian, neraca sumber daya alam (NSDA) menjadi sangat penting untuk mendukung penyusunan KLHS karena informasi tentang potensi dan pemanfaatan sumberdaya alam dapat diperoleh melalui analisis neraca. Pada tahun ini, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, khususnya Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya (PDS) melaksanakan Kegiatan Pemetaan Integrasi Neraca Sumberdaya Alam untuk Dukungan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada 10 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Pekalongan, Batang, Banjarnegara, Purbalingga, Gianyar, Klungkung, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Untuk mendukung kegiatan ini, pada tanggal 1-5 Juli 2019, tim teknis PDS

melakukan survei pengumpulan data sekunder ke beberapa instansi di Kabupaten Gianyar dan Klungkung, Provinsi Bali. Instansi yang dikunjungi antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Sumberdaya Air, serta Balai Wilayah Sungai. Data yang dikumpulkan adalah Rencana Tata Ruang Wilayah, dokumen KLHS, statistik kabupaten dalam angka, dan data wilayah sungai (debit, sebaran pos duga air, curah hujan, dan wilayah irigasi). Data tersebut nantinya akan dianalisis untuk menghitung neraca lahan, air, dan hutan. Selain itu, juga dilakukan proyeksi kebutuhan lahan dan air, serta integrasi neraca sumberdaya alam dengan KLHS. Melalui kegiatan ini diharapkan peranan NSDA akan lebih optimal dalam mendukung penyusunan KLHS kabupaten/kota. Tidak hanya masuk sebagai bagian dari gambaran umum saja namun juga lebih tajam ke analisis spasial lebih lanjut. [Sri Eka Wati, 2019]

FGD Perubahan Penggambaran Kerincian Kelas Unsur, Simbolisasi dan Tata Letak Peta Rencana Tata Ruang



Peserta FGD

Seiring dengan adanya perubahan pedoman penyusunan peta rencana tata ruang dari Permen PU menjadi Permen ATR/BPN, maka perlu dilakukan penyesuaian pada lampiran PP No. 8 Tahun 2013 yang mencakup tentang penyajian peta rencana tata ruang. Beberapa peraturan yang diubah antara lain Permen PU No 15 Tahun 2009 tentang Pedoman penyusunan Peta RTRW Provinsi, Permen PU No 16 Tahun 2009 tentang Pedoman penyusunan Peta RTRW Kabupaten, Permen PU No 17 Tahun 2009 tentang Pedoman penyusunan Peta RTRW Kota menjadi Permen ATR/BPN No.1 Tahun 2008 tentang Penyusunan Peta RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota. Untuk Peta Rencana Detail Tata Ruang berubah dari Permen PU No 20 Tahun 2011 menjadi Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2018 tentang penyusunan pedoman peta rencana detail tata ruang.

Perubahan lampiran PP 8 Tahun 2013 menjadi Perka

BIG tentang Perubahan Penggambaran Kerincian Kelas Unsur, Simbolisasi dan Tata Letak Peta Rencana Tata Ruang dimaksudkan untuk mengakomodir Permen ATR/BPN terutama terkait penyajian, simbolisasi, pewarnaan dan layout peta rencana tata ruang tersebut diatas. Hal teknis lain yang disesuaikan mencakup perubahan terkait susunan klasifikasi penyajian, perubahan pewarnaan, penambahan simbol baru dan tata letak. Untuk menajamkan perubahan tersebut, BIG melakukan pembahasan intensif dengan pakar akademisi dan draft konsep raperka ini telah kaji oleh akademisi dari UGM, UI, serta UNDP.

Selain dikaji oleh akademisi, draft raperka ini juga telah diintegrasikan dengan basis data peta rencana tata ruang untuk RTRW dan RDTR yang pada tahun ini disusun oleh Kementerian ATR. Raperka akan didorong menjadi Perka BIG dan ditargetkan untuk selesai tahun ini mengingat proses penyusunan peta rencana tata ruang baik RDTR maupun Revisi RTRW semakin dinamis dan harus segera diselesaikan menjadi perda. [Chintia Dewi, 2019]

Survei Lapangan Penyusunan Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi edisi Jawa Bagian Tengah



Survei Lapangan

Gunungapi sering dipandang sebagai ancaman bencana. Namun dibalik itu, sesungguhnya bentang lahan gunungapi menyimpan berkah dan potensi sumberdaya alam yang melimpah. Kekayaan alam tersebut perlu diinformasikan kepada publik dalam bentuk informasi geospasial berupa atlas. Sebagai salah satu bentuk penyajian inventarisasi potensi sumberdaya lahan khususnya di wilayah gunungapi, BIG melalui Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Bidang Atlas dan Pemetaan Sosial menyusun Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi. Kegiatan ini merupakan edisi ke dua setelah sukses tahun lalu dimulai dari wilayah Jawa Bagian Timur. Tahun ini wilayah kajian yang diambil adalah wilayah Jawa Bagian Tengah meliputi bentanglahan Gunung Lawu, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Ungaran, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Kompleks Gunung Dieng, dan Gunung Slamet. Sebagai bagian penting penyusunan atlas, dilakukan pengumpulan data melalui pelaksanaan survei ke gunung-gunung tersebut. Survei lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 26 Juli 2019 ini bertujuan untuk mengamati titik sampel dari bentang sumberdaya lahan, sosial, dan budaya yang ada di sekitar gunungapi. Titik sampel didasarkan pada geomorfologi/medan gunungapi mulai dari bagian kerucut, lereng atas, lereng tengah, lereng bawah, dataran kaki, dan dataran aluvial gunungapi. Dalam melaksanakan survei, tim survei dibagi menjadi 3 kelompok: Tim 1 Gunung Lawu, Tim 2 Gunung Merapi, Gunung Merbabu dan Gunung Ungaran, Tim 3 Gunung Sindoro, Gunung Sumbing dan Kompleks Gunung Dieng. Masing-masing tim terdiri dari tim BIG dan melibatkan juga tim teknis dari UGM yang diketuai oleh Prof.Dr. Junun Sartohadi. Hasil survei telah menghasilkan data lapangan yang siap diolah lebih lanjut agar atlas tersusun dengan baik. [Anggun Prabandari, 2019]



Peta Gunungapi Jawa Bagian Tengah

Rapat Pleno Rekomendasi Peta RTRW



Suasana Pleno

Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) melaksanakan kembali Rapat Pleno Pemberian Rekomendasi Persetujuan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada hari selasa, 24 Juli 2019. Kegiatan ini untuk menindaklanjuti beberapa hasil kegiatan Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang (RTR) Terekomendasi Paket 2 tahun 2019 serta sebagai upaya percepatan penyelesaian peta rencana tata ruang. Berdasarkan aturan yang berlaku, penyusunan Peta RTR wajib dikonsultasikan oleh penyusun, sehingga asistensi dan supervisi Peta RTR menjadi bagian kewajiban. Asistensi dan supervisi merupakan pemeriksaan peta oleh tim teknis, sedangkan rapat pleno merupakan sidang terbuka yang dihadiri oleh tim penguji dari luar PPTRA.

Rapat pleno merupakan rangkaian akhir dari

proses asistensi dan supervisi Peta RTR. Hal ini berarti pemerintah daerah telah menyelesaikan tahapan pelaksanaan asistensi dan supervisi, sehingga diusulkan untuk pemberian persetujuan peta. Pada rapat pleno dilakukan proses uji petik peta untuk melihat kesesuaian Peta RTR yang dihasilkan dengan standar penyusunannya. Aspek uji petik dalam rapat pleno mencakup geometris, kelengkapan tematik, dan perencanaan serta kartografis Peta RTR. Rapat pleno dilakukan secara bersamaan untuk sebelas Peta RTRW bertempat di Hotel Royal Padjadjaran Bogor. Pleno dihadiri oleh sebelas Pemerintah Kabupaten/Kota dari delapan provinsi. Peta RTRW yang dibahas dalam pleno ini adalah RTRW Kab. Seruyan, RTRW Kab. Katingan, RTRW Kab. Kulon Progo, RTRW Kab. Ngawi, RTRW Kota Sungaipenuh, RTRW Kab. Banyuasin, RTRW Kab. Banjarnegara, RTRW Kab. Wonogiri, RTRW Kab. Konawe Selatan, RTRW Kab. Sampang, dan RTRW Kab. Karimun. Pelaksanaan pleno menghadirkan tim penguji dari luar PPTRA yaitu peneliti utama dari Pusat Penelitian, Promosi dan Kerjasama

- BIG, antara lain Prof. Dr. Fahmi Amhar, Dr. Priyadi Kardono, dan Dr. Bambang Riadi. Penguji internal dari PPTRA yaitu Kepala Bidang Pemetaan Tata Ruang, Ryan Pribadi. Kepala PPTRA, Dr. Ir. Mulyanto Darmawan, M.Sc, dalam arahnya mengharapkan agar Peta RTRW yang disusun oleh pemerintah daerah dapat menjadi instrumen perencanaan pemanfaatan ruang yang lebih baik dengan memperhatikan aspek kualitas lingkungan hidup, sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat dan dapat menarik investasi ke wilayahnya. Berdasarkan hasil kesepakatan penilaian antara Kepala PPTRA dan tim penguji, rekomendasi diberikan untuk seluruh Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Beberapa Peta RTRW direkomendasi dengan catatan perbaikan minor antara lain RTRW Kab. Seruyan, RTRW Kab. Kulon Progo, RTRW Kab. Ngawi, RTRW Kab. Banyuasin, RTRW Kab. Banjarnegara dan RTRW Kab. Wonogiri. [Iman Sadesmesli, 2019]

PERENCANAAN PEMBANGUNAN



Sebagai pengantar, penulis dalam bukunya menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu proses dalam menentukan dan mengendalikan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan dari berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Penulis juga mengingatkan pentingnya kebijakan strategi pembangunan yang lebih terarah dan bersinergi dalam mencapai kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Pada bagian awal, buku ini menyajikan pengertian perencanaan pembangunan, fungsi perencanaan pembangunan, pendekatan-pendekatan yang digunakan, serta posisinya dalam perspektif lingkungan. Konsep perencanaan pembangunan yang meliputi tipe dan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan, sistem perencanaan pembangunan nasional, dan aspek perencanaan community development melengkapi sajian awal buku ini.

Judul Buku : Perencanaan Pembangunan
Penulis : Mukmin Muhammad
Penerbit : Cv. Dua Bersaudara

Pembahasan selanjutnya menyinggung soal kebijakan pembangunan nasional dan rencana pembangunan yang strategis. Sasaran pembangunan demokrasi, pembangunan nasional dalam rencana kerja, dan isu strategis untuk mendukung prinsip nasional menjadi sub topik dalam pembahasan kebijakan pembangunan nasional. Sedangkan rencana pembangunan yang strategis memiliki isu pada program pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi serta iklim usaha. Kemudian pada bagian akhir, pembahasan mengerucut pada isu peningkatan kesejahteraan. Mulai dari pembangunan infrastruktur, perkembangan regional ASEAN, peran ekspor Indonesia sampai dengan program kerja di daerah. Berbagai pembahasan yang telah diuraikan dalam buku ini dapat menjadi tambahan pemahaman bagi pembaca yang aktif di bidang perencanaan pembangunan, bagi para mahasiswa, maupun sebagai bahan bacaan untuk masyarakat luas. [Rochmad Budi Santoso, 2019]



Mukmin Muhammad